

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Munir Mulkan *et.al.* 2002. *Membongkar Praktek Kekerasan*. PSIF Universitas Muhammadiyah Malang.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana. Jakarta.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada Depok.
- Bagir Manan. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH FH UII. Yogyakarta.
- Bagong Suyanto. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Prenada Media. Jakarta.
- Eny Kusdarini. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. UNY Press. Yogyakarta.
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat. 2022. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Penerbit Nuansa Cendekia. Bandung.
- H. Syaukani *et.al.* 2005. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenamedia Group. Depok.
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. PT Buku Seru. Jakarta.
- Kristi Poerwandari. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feministik* dalam buku "Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya". Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. Jakarta.

- , 2006. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis dalam Tapi Omas Ihromi (dkk), Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Alumni. Bandung.
- Lutfi Effendi. 2003. *Popok-Pokok Hukum Administrasi*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Martin Jumung. 2005. *Politik Hukum dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Pustaka Nusantara. Jakarta.
- Monandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama. Bandung.
- Nomensen Sinamo. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- , 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Siswanto Suwarno. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sjahan Basah. 1997. *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*. Citra Aditya. Bandung.

Sri Warjiyati. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Prenamedia Group. Jakarta.

Stout HD. 2004. *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni. Bandung.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah: Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Sinar Mulia. Jakarta.

Valentina Sagala. 2022. *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Widarta. 2001. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Laper Pustaka Utama. Yogyakarta.

## **Jurnal**

A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 2, No. 4 April 2010.

Ateng Syarifuddin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justitia, Vol. 17 Edisi IV, Oktober 2000.

Kamal Kenny, Asnarulkhadi Abu Samah, dan Benjamin Chan Yin Fah, *Sexual Harassment: Is It A Case of Gendered Perspective*, International Journal of Humanities and Social Science, Centre of Promoting Ideas, Vol. 1, No. 19 Desember 2011.

Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Jaya, Vol. 18 No. 2 Desember 2018.

Sri Endah Kinasih, *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*, Jurnal Universitas Airlangga, Vol. 20, No. 4 Oktober 2010.

Tri Wahyu Widiastuti, *Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan*, Wacana Hukum, Vol. 7, No. 1 April 2008.

### **Internet**

<https://sulsel.inews.id/berita/mahasiswa-di-makassar-laporkan-dugaan-kekerasan-seksual-mantan-pacar/3> diakses pada tanggal 18 Desember 2021 Pukul 14.35 WITA.

<https://www.limapagi.id/detail/p5k6a/34-anak-diperkosa-dan-16-dicabuli-di-makassar-sepanjang-2021> diakses tanggal 18 Desember 2021 Pukul 15.59 WITA.

<https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/lbh-makassar-hanya-20-persen-kasus-kekerasan-seksual-diproses-pidana/3> diakses tanggal 18 Desember 2021 Pukul 16.17 WITA.

<https://fajar.co.id/2021/07/03/sejak-awal-2021-kasus-kekerasan-seksual-anak-marak-di-sulsel/> diakses tanggal 27 Desember 2021 Pukul 22.34 WITA.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/85/833/informasi-kelembagaan-kpp-pa> diakses tanggal 31 Oktober 2022 Pukul 14.50 WITA.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan PBB Tahun 1993

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Daerah kota Makassar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Walikota Makassar No. 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### **Lainnya**

Rekap data kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar tahun 2019-2022

Rekap data kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021-2022

SOP UPTD PPA Kota Makassar

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686. Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor : 2838/UN4.5.1/PT.00/2023  
Lampiran : -  
Hal : PENELITIAN

Makassar, 13 April 2023

Kepada  
Yth. : KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR  
di,-  
TEMPAT

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : A. NUR ASHMA FAUZIYAH USMAN  
No. Pokok : B11116391  
No. HP : 081245971232  
Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Alamat : Komp. Panakkukang Mas II Blok C2 No.12  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Marwati Riza ,S.H., M.Si.  
2. Muhammad Zulfan Hakim ,S.H., M.H.

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

KEWENANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;



#generated\_by\_law\_information\_system\_fh-uh in 2023-04-13 13:41:19





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171  
Laman [dpmptsp.makassarkota.go.id](http://dpmptsp.makassarkota.go.id) Pos-el [dpmptsp@makassarkota.go.id](mailto:dpmptsp@makassarkota.go.id)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 070/162/SKP/DPMPSTP/IV/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
  3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 15659/S.01/PTSP/2023 Tanggal 17 April 2023;
  5. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/172-II/BKBP/IV/2023 Tanggal 17 April 2023.

**DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :**

Nama : A. NUR ASHMA FAUZIYYAH USMAN  
NIM / Jurusan : B11116391 / Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar  
Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar  
Waktu Penelitian : 26 April s/d 25 Juni 2023  
Tujuan : Skripsi  
Judul Penelitian : "KEWENANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email [bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com](mailto:bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com).
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Makassar, 26 April 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

**A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.**







**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)

Makassar 90231

Nomor : **15659/S.01/PTSP/2023**

Lampiran : -

Perihal : **Izin penelitian**

**Kepada Yth.**

1. Walikota Makassar
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & KB Prov. Sulsel

di-

**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 2269/UN4.5.1/PT.0/2023 tanggal 18 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

**N a m a** : **A. NUR ASHMA FAUZIYAH USMAN**  
**Nomor Pokok** : B11116391  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Pekerjaan/Lembaga** : Mahasiswa (S1)  
**Alamat** : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" KEWENANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 April s/d 25 Juli 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 17 April 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*